

Implementasi dan Tantangan Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung

Implementation and Challenges of Revitalizing Local Languages in Lampung Province

Elga Andina

elga.andina@dpr.go.id

Pusat Analis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Indonesia

Received: April 3, 2023 | Revised: May 16, 2023 | Published: June 30, 2023

Abstract: The revitalization of local languages in Indonesia has become an increasingly important issue and requires serious attention. The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology responded to this crisis by implementing Merdeka Belajar Episode 17, which focuses on revitalizing local languages in the province of Lampung in 2023. This research aims to evaluate the challenges of revitalizing local languages implemented by the government in Lampung province. Using a qualitative descriptive approach with a case study pattern, primary data were obtained from interviews and focused group discussions with government agencies involved in revitalizing local languages, including the Lampung Provincial Language Office, the Lampung Provincial Education Office, and the Welfare Department of the Lampung Provincial Government, in addition to academic from Lampung University. The study found that in Lampung province, revitalization is carried out through structured learning activities in schools by using the Model B approach, which included teaching local content, especially the Lampung language. Although there are compulsory regulations to teach the Lampung language in primary and secondary schools, several challenges have remained, such as psychological barriers faced by communities in using local languages, insufficient support from the government, and weak interagency coordination in implementing language revitalization programs. Overcoming these challenges requires joint efforts from all parties to promote the use of local languages and document them, provide consistent government support, and increase public awareness of the importance of preserving them. It is expected that the result of this study can contribute to the improvement and enrichment of cultural diversity in Indonesia.

Keywords: local language revitalization; Merdeka Belajar Episode 17; Model B revitalization

Abstrak: Revitalisasi bahasa daerah di Indonesia telah menjadi isu yang semakin penting dan memerlukan perhatian serius. Kemendikbudristek merespons krisis tersebut dengan menerapkan Merdeka Belajar Episode 17 Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk



mengevaluasi tantangan implementasi revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan pemerintah di Provinsi Lampung. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola studi kasus, data primer diperoleh dari wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan instansi pemerintah pelaksana revitalisasi bahasa daerah, yaitu Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dan Bidang Kesra Pemerintah Provinsi Lampung, ditambah dengan akademisi Universitas Lampung. Penelitian ini menemukan bahwa di Provinsi Lampung revitalisasi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran terstruktur di sekolah dengan menggunakan pendekatan Model B yang mencakup pengajaran konten lokal, khususnya bahasa Lampung. Meskipun sudah ada regulasi untuk mengajarkan bahasa Lampung di sekolah dasar dan menengah, tantangan masih ada seperti hambatan psikologis yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan bahasa daerah, dukungan yang kurang dari pemerintah, dan koordinasi antarlembaga yang lemah dalam menjalankan program pemulihan bahasa daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan upaya bersama dari semua pihak untuk mempromosikan penggunaan bahasa daerah, mendokumentasikannya, memberikan dukungan pemerintah yang konsisten, dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya melestarikannya. Dengan melakukan hal tersebut, bahasa daerah di Indonesia dapat terus berkembang dan memperkaya keanekaragaman budaya di negara ini.

Kata kunci: Merdeka Belajar Episode 17; revitalisasi bahasa daerah; revitalisasi Model B

Pendahuluan

Bahasa daerah merupakan salah satu aset budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Bahasa daerah memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas suku bangsa serta sebagai salah satu wujud kekayaan budaya Indonesia. Bahasa sangat erat terkait dengan pengetahuan budaya dan identitas politik sehingga bentuk-bentuk ucapan sering berfungsi sebagai indikator penting dari vitalitas dan kesejahteraan sosial komunitas. Indonesia memiliki jumlah bahasa terbanyak di dunia, yaitu 718 bahasa, sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan bahasa daerah semakin tergeser oleh penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing.

Pada tanggal 21 Februari 2019, UNESCO mengumumkan bahwa sekitar 2.500 bahasa di seluruh dunia terancam punah, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia (Hutapea, 2021). UNESCO mencatat bahwa selama 30 tahun terakhir, telah terjadi kepunahan 200 bahasa daerah di seluruh dunia, dimana penyebab utama adalah ketidakgunaan dan ketidakwarisan bahasa tersebut oleh penutur asli kepada generasi berikutnya (Nita, 2022).

Kehilangan bahasa tampaknya tidak terjadi karena faktor tunggal: tidak hanya secara alami tapi juga dipengaruhi perubahan sosial dan ekonomi. Menurut Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Imam Budi Utomo, ada dua faktor utama bahasa daerah jarang digunakan: pertama, faktor eksternal, seperti urbanisasi, globalisasi, perkawinan campur, ataupun bencana yang mengakibatkan kematian penutur bahasa daerah; kedua, faktor internal, seperti sikap bahasa (Gandhawangi, 2023). Pengabaian penggunaan bahasa daerah oleh penutur muda dapat menandakan akan terjadinya kepunahan bahasa. Saat ini, generasi muda kurang terampil dalam menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka hanya memahami bahasa daerah secara pasif, namun tidak mampu berbicara dalam bahasa tersebut. Jika situasi ini terus berlanjut,

mungkin dalam beberapa tahun ke depan akan semakin banyak bahasa daerah yang hilang dan punah karena tergerus oleh waktu.

Hal ini juga terjadi di Provinsi Lampung, dimana bahasa daerah Lampung mulai terpinggirkan dan kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2023 Provinsi Lampung mengajukan diri untuk mengikuti program revitalisasi bahasa daerah. Secara nasional, program revitalisasi ada di bawah payung Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah yang dicanangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, pada tanggal 22 Februari 2022. Program ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan bahasa daerah sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Program ini juga merupakan respons terhadap kekhawatiran Komisi X DPR RI yang mengidentifikasi lemahnya perlindungan bahasa daerah di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, bahasa daerah merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang memerlukan upaya inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Permasalahannya, Indonesia merupakan negara dengan variasi geografi ekstrem sehingga perlu mempertimbangkan bahwa setiap wilayah atau kelompok masyarakat mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa menggunakan kebijakan *one size fit for all*, atau kebijakan yang sama untuk seluruh wilayah atau kelompok masyarakat. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang berbeda-beda untuk masing-masing wilayah atau kelompok masyarakat, yang memperhatikan perbedaan-perbedaan tersebut. Strategi yang ditetapkan di pusat belum tentu tepat di daerah, misalnya di Provinsi Lampung. Wilayah ini dekat dengan Pulau Jawa dan pernah menjadi lokasi transmigrasi sejak tahun 1905 sehingga penduduknya sangat heterogen. Pada Sensus 2010 proporsi suku bangsa di Provinsi Lampung: Jawa (65,29 persen), suku asal Lampung (13,82 persen), Sunda (9,8 persen), suku asal Sumatera Selatan (5,5 persen), dan sisanya suku lain (Na'im & Syaputra, 2010, pp. 36–41). Provinsi Lampung dipilih sebagai lokus karena memiliki enam bahasa utama, yaitu Bali, Basemah, Bugis, Jawa, Lampung, dan Sunda, dengan jumlah penutur banyak. Lampung juga merupakan salah satu dari sedikit daerah yang memiliki aksara sendiri. Kondisi ini memberikan corak tersendiri yang membedakan dengan wilayah lain yang homogen. Oleh karena itu, pemahaman bahasa Lampung oleh masyarakat Lampung sangat rendah, sehingga revitalisasi bahasa Lampung sangat dibutuhkan (Kantor Bahasa Provinsi Lampung, 2022).

Tulisan ini memberikan evaluasi mengenai tantangan implementasi revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan pemerintah di Provinsi Lampung. Upaya revitalisasi bahasa daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) semata. Penelitian ini ingin memfokuskan pada dua pertanyaan penelitian, yaitu (1) bagaimana implementasi revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung?; dan (2) apa saja tantangan dalam implementasi revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung?

Penelitian mengenai revitalisasi bahasa Lampung sudah pernah dilakukan oleh Putri (2018) dan Rahayu (2020) yang menemukan penyebab kepunahan bahasa Lampung. Rahayu (2020) bahkan menjelaskan mengenai pelaksanaan muatan lokal bahasa Lampung, yang mana muatan lokal merupakan salah satu strategi revitalisasi bahasa daerah. Penelitian ini ingin memperbarui temuan yang ada setelah dicanangkannya program Merdeka Belajar Episode 17 pada 22 Februari 2022.

Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus di Provinsi Lampung, penelitian ini berusaha memahami situasi dan kondisi di Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan revitalisasi bahasa daerah. Penelitian ini merupakan bagian dari pengumpulan data bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis Keperlemenan yang dilakukan pada tanggal 13–17 Februari 2023 di Provinsi Lampung.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi Lampung, dan akademisi bahasa Lampung dari Universitas Lampung. Setiap responden memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang diberikan. Dengan begitu, penelitian ini membatasi pada upaya pemerintah dalam implementasi revitalisasi bahasa daerah. Data sekunder diperoleh dari Laporan Kinerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2022 dan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Selain itu, digunakan juga teknik observasi untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi aktual tentang revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung, sepe-

Tabel 1. Pengelompokan Kode

Pertanyaan penelitian	Bagaimana implementasi revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung?	Apa saja tantangan dalam implementasi revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung?
Status kebahasaan	-	✓
Program dan upaya revitalisasi	✓	-
Pembelajaran bahasa Lampung di sekolah	✓	✓
Tantangan pembelajaran	-	✓
Permasalahan SDM	-	✓
Peran instansi untuk revitalisasi	✓	✓
Kerja sama antarinstansi	✓	-
Landasan hukum	✓	✓

Tabel 2. Temuan untuk Pertanyaan “Bagaimana implementasi revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung?”

Informan	Kegiatan Revitalisasi
Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Program pembinaan bahasa Lampung melalui program revitalisasi bahasa daerah yang akan dilaksanakan tahun 2023.
Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Pendidikan bahasa Lampung di sekolah masuk dalam mata pelajaran muatan lokal berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014.

Tabel 3. Temuan untuk Pertanyaan “Apa saja tantangan dalam implementasi revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung?”

Informan	Payung Hukum	Permasalahan SDM
Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Kebutuhan hukum dalam upaya pelestarian bahasa Lampung ...	Minimnya tenaga pendidik bahasa Lampung yang berijazah Pendidikan Bahasa Lampung ...
Bidang Kesra Pemerintah Provinsi Lampung	Sangat dibutuhkan pengaturan khusus yang berfokus pada upaya pengembangan bahasa Lampung.	Bahasa Lampung sebagai bahasa daerah sudah diajarkan pada jalur pendidikan formal di satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah.

ti bagaimana masyarakat menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari dan bagaimana program revitalisasi bahasa daerah diimplementasikan. Untuk memperkaya pemahaman mengenai konteks bahasa Lampung, penulis juga melakukan studi literatur yang membantu dalam memperoleh informasi tentang sejarah bahasa daerah di Provinsi Lampung, program revitalisasi bahasa daerah yang telah dilakukan, serta dampaknya terhadap identitas lokalnya. Berita revitalisasi bahasa daerah diambil dari situs Kemendikbudristek dan Balai Bahasa (beserta UPT-nya).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh dari observasi atau wawancara. Untuk itu peneliti melakukan pengodean atas jawaban tertulis yang disampaikan. Penulis menyematkan tema untuk kalimat-kalimat yang sering muncul: status kebahasaan, program dan upaya revitalisasi, pembelajaran bahasa Lampung di sekolah, tantangan pembelajaran, permasalahan sumber daya manusia (SDM), peran instansi untuk revitalisasi, kerja sama antarinstansi, dan landasan hukum. Kode tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan pertanyaan penelitian yang dapat dilihat di Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Konsep Revitalisasi Bahasa Daerah

Bahasa Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mendefinisikan bahasa daerah sebagai bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Harimansyah, 2017, p. 12). Bahasa daerah berperan sebagai indikator dalam melestarikan budaya daerah dan memperkuat kebudayaan Indonesia dengan asumsi bahwa bahasa tersebut mengandung nilai-nilai dan karakteristik kebudayaan dari suatu daerah. Di tingkat lokal, bahasa daerah dijadikan sebagai sarana untuk melestarikan kebudayaan di daerah tersebut. Di sisi lain, di tingkat ilmu dan peradaban, bahasa daerah dianggap sebagai kekayaan ilmu dan keragaman peradaban yang harus dijaga, dipelihara, dan dilestarikan.

Definisi Revitalisasi Bahasa Daerah

Kemendikbudristek (2022a) menjelaskan yang dimaksud dengan revitalisasi bahasa daerah sebagai upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pewarisan bahasa daerah kepada generasi muda untuk mendorong penggunaannya dalam komunikasi yang beragam sehingga daya hidup bahasa daerah tersebut pada taraf aman dan ditransmisikan dengan baik. Definisi revitalisasi yang diberikan oleh Harimansyah (2017) juga menggarisbawahi pentingnya tindakan atau kegiatan dalam meningkatkan kehidupan bahasa, baik melalui pengembangan, perlindungan, maupun pembinaan penutur bahasa. Dengan demikian, revitalisasi bahasa daerah menjadi suatu hal yang sangat diperlukan untuk mempertahankan keanekaragaman budaya dan bahasa di Indonesia.

Revitalisasi bahasa (juga disebut sebagai ‘kebangkitan bahasa,’ ‘regenesis bahasa,’ ‘pembaruan bahasa,’ atau ‘pemeliharaan bahasa’) adalah bentuk perencanaan bahasa, yang melibatkan ‘upaya sengaja untuk memengaruhi perilaku orang lain dengan memperhatikan akuisisi, struktur, atau alokasi fungsional kode bahasa mereka’ (Cooper, 1989, dalam Friedman, 2011, p. 631). Revitalisasi bahasa juga mencakup aspek perubahan bahasa lain, termasuk kehilangan bahasa, konvergensi bahasa, atau penyempitan jangkauan fungsi sosial suatu bahasa. Kehilangan bahasa merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan penurunan tingkat kompetensi linguistik pembicara atau pengurangan dalam kompleksitas struktural, leksikal,

atau pragmatis dari bahasa, sedangkan konvergensi bahasa terjadi ketika kontak bahasa mengubah sistem linguistik secara ekstensif (Friedman, 2011, p. 631).

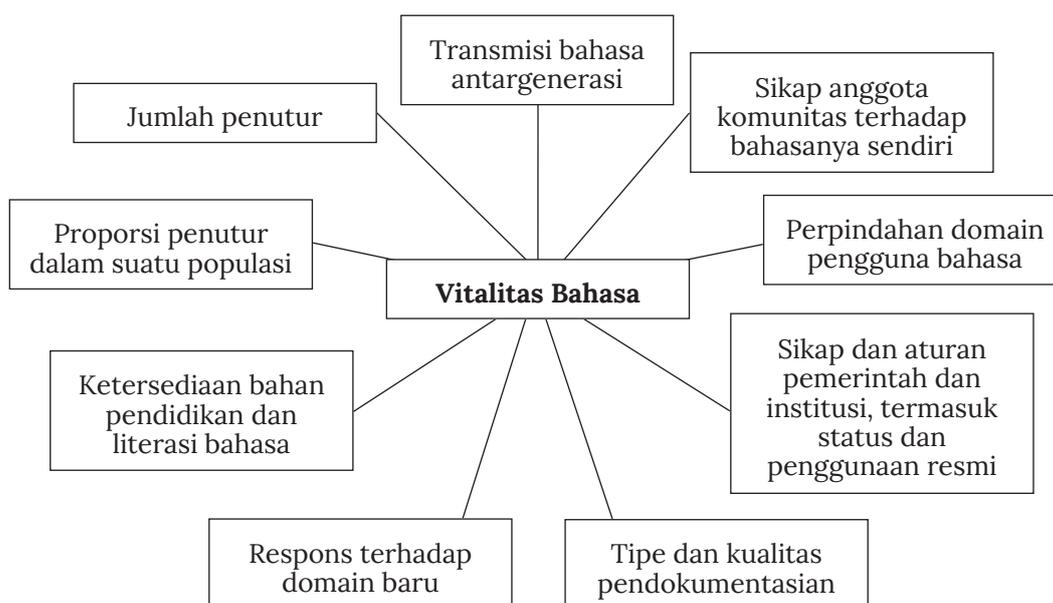
Sebelum melakukan revitalisasi bahasa daerah, perlu diketahui tingkat vitalitas bahasa tersebut. Bahasa dengan tingkat vitalitas yang kuat atau dalam kondisi aman tidak perlu direvitalisasi. Namun, yang vitalitasnya lemah perlu menjadi target proyek revitalisasi. Asesmen Vitalitas Bahasa dari UNESCO menunjukkan beberapa aspek yang memengaruhi vitalitas bahasa, mulai dari jumlah penutur, transmisi bahasa antargenerasi, sikap anggota komunitas terhadap bahasanya sendiri, proporsi penutur dalam suatu populasi, ketersediaan bahan pendidikan dan literasi bahasa, respons terhadap domain baru, tipe dan kualitas pendokumentasian bahasa, perpindahan domain penggunaan bahasa, hingga sikap dan aturan pemerintah dan institusi terhadap status dan penggunaan resmi bahasa.

Jenis-jenis Revitalisasi Bahasa Daerah

Ada beberapa strategi revitalisasi babahasa yang dapat digunakan untuk membalikkan pergeseran bahasa dan mempromosikan pelestarian dan pemulihan bahasa-bahasa yang terancam punah. Beberapa strategi ini meliputi: pertama, dokumentasi bahasa (Perley, 2021), yang melibatkan pencatatan dan pengarsipan bahasa-bahasa yang terancam punah melalui pengumpulan sejarah lisan, teks tertulis, dan rekaman audio dan video.

Kedua, pendidikan bahasa. Ini melibatkan promosi pengajaran dan pembelajaran bahasa-bahasa yang terancam punah melalui program pendidikan formal dan informal. Ini dapat mencakup program imersi bahasa, kelas bahasa di sekolah, dan inisiatif pembelajaran bahasa berbasis masyarakat. Contohnya pembelajaran bahasa Hawaii sejak tahun 1970 (Montgomery-Anderson, 2013).

Ketiga, strategi kebijakan bahasa yang melibatkan implementasi kebijakan yang mendukung penggunaan dan pengakuan bahasa-bahasa yang terancam punah di berbagai domain, seperti pendidikan, layanan pemerintah, dan media. Kebijakan pemerintah Wales merupakan contoh dukungan pemerintah untuk revitalisasi bahasa Wales sejak tahun 1960-an di Inggris (Williams, 2013), sedangkan di Amerika sudah



Bagan 1. Aspek yang Memengaruhi Vitalitas Bahasa Menurut UNESCO

Sumber: Pine & Turin (2017, p. 6).

ada Esther Martinez Native American Languages Preservation Act di tahun 1990/1992 (Warhol, 2012).

Keempat, pelibatan masyarakat dalam upaya pemulihan bahasa. Ini bisa mencakup mempromosikan inisiatif pelestarian dan pemulihan bahasa yang dipimpin oleh masyarakat, mendorong penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, dan memupuk kebanggaan pada bahasa dan budaya.

Terakhir dengan teknologi bahasa. Penelitian menarik oleh Herrera (2022) menunjukkan dukungan teknologi dalam pembelajaran bahasa. Teknologi dapat digunakan mendukung upaya pemulihan bahasa, seperti mengembangkan aplikasi pembelajaran bahasa, membuat arsip digital sumber daya bahasa, dan menggunakan media sosial untuk mempromosikan bahasa dan budaya.

Strategi-strategi ini dapat digunakan secara kombinasi atau individual, tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik komunitas bahasa. Revitalisasi dapat dilakukan melalui pembelajaran bahasa daerah oleh penutur bahasa yang bersangkutan, baik secara klasikal (secara bersama-sama di dalam kelas atau kelompok) maupun pemo-
delan pada suatu komunitas tertentu (Harimansyah, 2017, p. 10). Untuk mendukung upaya ini, dilakukan penyediaan dokumentasi referensi kebahasaan, seperti tata bahasa dan kamus, serta penyusunan bahan ajar untuk pembelajaran bahasa.

Upaya revitalisasi bahasa yang berhasil memerlukan dukungan dan komitmen berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat, pendidik, pembuat kebijakan, dan ahli bahasa. Laporan UNESCO (2011) tentang Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antarbudaya menekankan pentingnya investasi pada keanekaragaman budaya dan dialog antarbudaya untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Laporan tersebut menyoroti kebutuhan akan kebijakan yang mendukung pelestarian dan promosi keanekaragaman budaya, termasuk revitalisasi bahasa yang terancam punah. Laporan ini juga menekankan pentingnya dialog dan kerja sama di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mempromosikan keanekaragaman budaya dan dialog antarbudaya.

Di Indonesia, Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional (2017) telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap sistem pendidikan nasional yang menekankan pentingnya mempromosikan penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan untuk mempertahankan dan mempromosikan keanekaragaman budaya. Laporan tersebut juga menyoroti kebutuhan akan kebijakan yang mendukung revitalisasi bahasa daerah dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidik, pembuat kebijakan, dan pemimpin masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 juga menekankan pentingnya mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat, dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Rencana tersebut menyoroti kebutuhan akan kebijakan yang mendukung pelestarian dan promosi keanekaragaman budaya, termasuk revitalisasi bahasa daerah. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidik, pembuat kebijakan, dan pemimpin masyarakat, sangat penting dalam revitalisasi bahasa daerah untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.

Model Revitalisasi Bahasa Daerah dalam Merdeka Belajar 17

Pada tahun 2022, revitalisasi bahasa daerah ini ditujukan untuk 1.491 komunitas penutur bahasa daerah, 29.370 guru, 17.955 kepala sekolah, 1.175 pengawas, serta 1,5 juta siswa di 15.236 sekolah (Kemendikbudristek, 2022c). Dalam upaya ini, Mendik-

budristek bekerja sama dengan keluarga, para maestro, dan pegiat perlindungan bahasa dan sastra untuk mengembangkan model pembelajaran bahasa daerah, mengaya materi dalam kurikulum, dan merumuskan muatan lokal kebahasaan dan kesastraan. Kemendikbudristek melatih guru bahasa daerah, mengembangkan model pembelajaran yang fleksibel dan inovatif, serta mengadaptasi kurikulum dan materi pembelajaran sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. Pada tahun 2022, tiga bahasa daerah di Kalimantan Timur berhasil direvitalisasi, yaitu bahasa Paser, Kenyah, dan Kutai.

Tidak semua daerah dapat diberikan intervensi revitalisasi yang sama. Keragaman geografi Indonesia menjadi alasan perlunya mempertimbangkan bahwa setiap wilayah atau kelompok masyarakat mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Daerah target revitalisasi dapat berbeda dalam beberapa hal. Pertama, aksesibilitas: wilayah yang luas atau terpencil dapat membuat aksesibilitas menjadi sulit, terutama jika infrastruktur dan transportasi masih belum memadai. Kedua, keragaman budaya: negara dengan variasi geografi ekstrem sering kali memiliki keragaman budaya yang kompleks. Hal ini dapat mempersulit implementasi kebijakan publik karena setiap wilayah atau kelompok masyarakat mungkin memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya khusus untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan yang berbeda-beda ini. Ketiga, biaya: melaksanakan kebijakan publik di wilayah yang luas atau terpencil dapat memerlukan biaya yang lebih tinggi, seperti biaya transportasi, biaya komunikasi, dan biaya infrastruktur. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif dan efisien. Keempat, koordinasi: negara dengan wilayah yang sangat luas dan variasi geografi ekstrem dapat memerlukan koordinasi yang sangat baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara instansi pemerintah yang berbeda. Koordinasi yang buruk dapat menghambat pelaksanaan kebijakan publik yang terintegrasi dan konsisten di seluruh wilayah. Kelima, kapasitas SDM: wilayah yang luas dan terpencil dapat memerlukan tenaga ahli dan SDM yang lebih banyak dan terlatih untuk melaksanakan kebijakan publik. Kekurangan SDM yang memadai dapat menghambat implementasi kebijakan publik yang efektif dan efisien di seluruh wilayah.

Oleh karena itu, Badan Bahasa merancang tiga jenis model revitalisasi. Pertama, revitalisasi Model A yang dapat digunakan ketika daya hidup bahasa masih aman, jumlah penutur masih banyak, dan bahasa tersebut masih menjadi bahasa yang dominan di dalam masyarakat (Kemendikbudristek, 2022b). Model A menekankan pada pewarisan bahasa secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah berbasis sekolah. Pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler. Dengan menggunakan Model A, siswa dapat belajar bahasa daerah secara menyeluruh dan terstruktur, sehingga dapat memahami nilai-nilai dan karakter kebudayaan yang terkandung dalam bahasa tersebut. Dengan cara ini, diharapkan siswa akan lebih memahami pentingnya menjaga dan melestarikan bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Model ini digunakan untuk bahasa Jawa, Sunda, dan Bali.

Sementara Model B digunakan untuk daerah dengan bahasa yang tergolong rentan karena bahasa tersebut digunakan secara bersaing dengan bahasa-bahasa daerah lain. Meskipun jumlah penutur bahasa masih relatif banyak, namun penggunaannya semakin berkurang dan terancam hilang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pelestarian bahasa melalui pewarisan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah yang berbasis sekolah, jika wilayah tutur bahasa itu memadai. Selain itu, pewarisan juga dapat dilakukan dalam wilayah tutur bahasa melalui pembelajaran berbasis komunitas. Pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran bahasa tersebut haruslah meng-

integrasikan konteks lokal, sehingga dapat memperkuat keberadaan bahasa daerah tersebut dalam masyarakat. Selain itu, pembelajaran juga harus dilakukan secara adaptif, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, sehingga bahasa daerah tersebut dapat terus hidup dan berkembang sesuai kebutuhan zaman. Bahasa-bahasa di Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat dapat direvitalisasi menggunakan model ini.

Terakhir, revitalisasi Model C, yang merupakan sebuah pendekatan untuk diterapkan pada daerah-daerah yang bahasanya mengalami kemunduran, terancam punah, atau bahkan kritis. Jumlah penutur dari bahasa tersebut sangat sedikit dan tersebar dengan terbatas. Pendekatannya adalah melalui Pewarisan yang dilakukan melalui pembelajaran berbasis komunitas, khususnya untuk wilayah tutur bahasa yang sangat terbatas dan khas. Pembelajaran dilakukan dengan menunjuk dua atau lebih keluarga sebagai model tempat belajar atau dilakukan di pusat kegiatan masyarakat, seperti tempat ibadah, kantor desa, atau taman bacaan masyarakat. Berbeda dengan Model A dan Model B, Model C memerlukan upaya yang lebih intensif dan spesifik untuk mempertahankan dan memperkuat keberlangsungan hidup bahasa tersebut. Contoh bahasa yang membutuhkan pendekatan Model C antara lain bahasa-bahasa di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

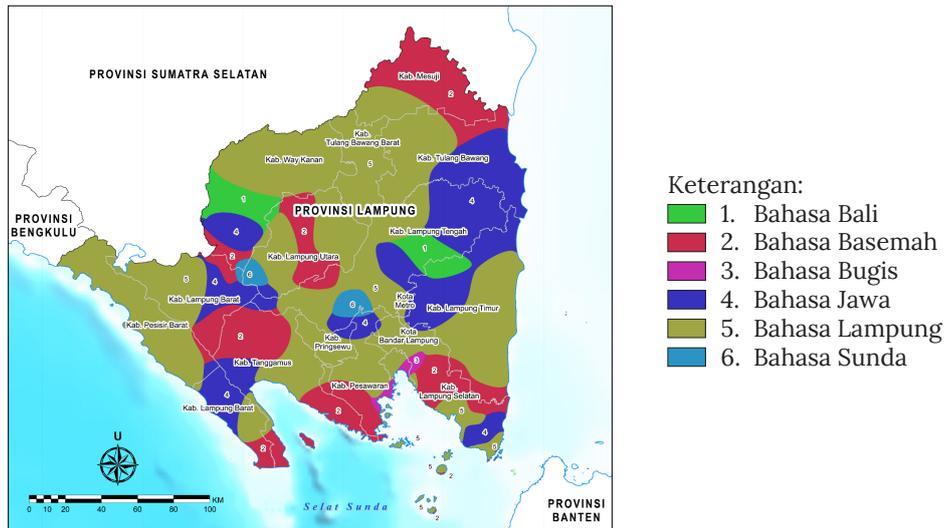
Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam program revitalisasi bahasa daerah ini (Kemendikbudristek, 2022c). Pertama, para generasi muda diharapkan menjadi penutur aktif bahasa daerah dan mempelajarinya dengan senang hati melalui media yang disukai. Kedua, tujuan revitalisasi bahasa daerah adalah untuk menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah itu sendiri. Ketiga, revitalisasi juga bertujuan untuk menciptakan ruang kreativitas dan kebebasan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya. Keempat, revitalisasi bahasa daerah juga bertujuan untuk menemukan fungsi baru dari bahasa dan sastra daerah serta menciptakan rumah baru bagi keduanya.

Badan Bahasa bertugas sebagai *leading sector* upaya revitalisasi bahasa daerah ini. Namun, program ini tidak dapat dijalankan sendiri. Badan Bahasa bertugas mengoordinasikan semua pihak yang terlibat dalam revitalisasi bahasa daerah, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, komunitas penutur bahasa, lembaga adat, dan sekolah. Revitalisasi bahasa daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Bahasa.

Kondisi Bahasa Lampung Sekarang

Penduduk asli, suku Lampung, secara umum dapat dibedakan ke dalam dua kelompok: masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir (Kantor Bahasa Provinsi Lampung, 2008, pp. 2–3). Masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman disebut Pepadun, sedangkan yang tinggal di daerah pesisir disebut Saibatin. Konon, suku Lampung (baik Pepadun maupun Saibatin) menggunakan bahasa Lampung hanya dalam berkomunikasi di lingkungan keluarga, sesama suku Lampung, dan pada upacara adat. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Lampung sangat beragam. Walaupun begitu, Lampung memiliki bahasa daerah yang digunakan oleh suku asli Lampung, yaitu bahasa Lampung. Secara garis besar, bahasa Lampung memiliki dua dialek, yaitu dialek A dan dialek O, yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung. Berikut ini peta persebaran bahasa yang ada di Provinsi Lampung (Kantor Bahasa Provinsi Lampung, 2022a, pp. 1–2).

Saat ini kondisi bahasa Lampung di masyarakat masih tergantung pada komunitas penuturnya yang didasarkan pada kondisi demografis dan geografis wilayahnya. Jika



Gambar 1. Peta Bahasa di Lampung

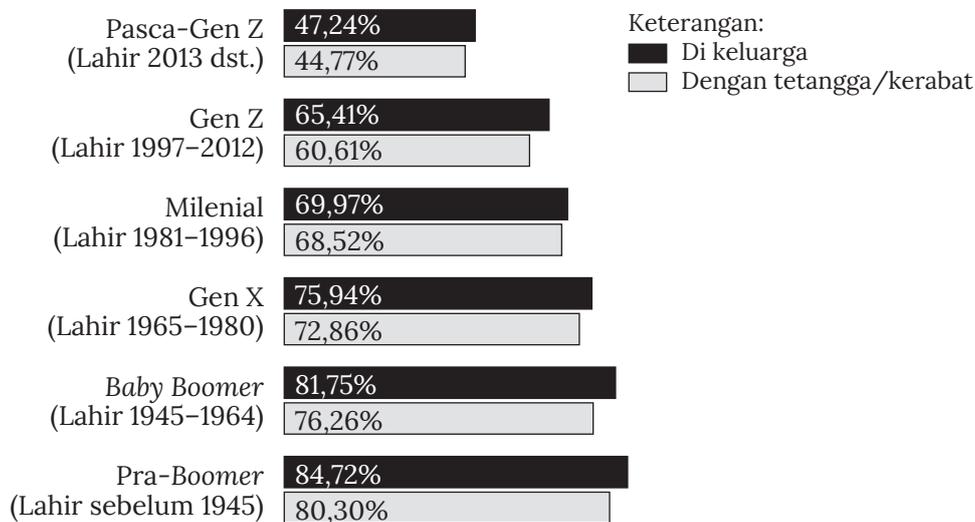
Sumber: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d.).

ditinjau dari data BPS berdasarkan suku bangsa di Provinsi Lampung tahun 2010, maka jumlah penduduk yang beretnis Lampung hanya sebanyak 13,82 persen dibanding etnis Jawa yang jumlahnya lebih dari 65,29 persen dari total penduduk yang ada (Na'im & Syaputra, 2010, pp. 36–41).

Menurut Sensus Penduduk tahun 2020, 68,23 persen penduduk Provinsi Lampung masih menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan keluarga dan 64,93 persen masih berkomunikasi menggunakan bahasa daerah dengan tetangga/kerabat (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023, p. 21). Sensus juga menemukan semakin muda generasi semakin rendah keterampilan berbahasa daerah.

Pola komunikasi suku asli Lampung dengan pendatang ditandai dengan penggunaan bahasa Indonesia. Hal itu merupakan salah satu cara suku Lampung untuk menghormati orang yang bukan suku Lampung. Menurut sensus penduduk 2020, 99,74 persen penduduk Lampung bisa menggunakan bahasa Indonesia (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2023, p. 21). Bahasa Indonesia sebagai perantara menjadi senjata untuk bergaul di daerah yang sangat heterogen.

Para pendatang (bukan suku Lampung) menyebar dan tinggal di hampir seluruh wilayah Provinsi Lampung. Mereka datang ke Lampung membawa bahasa (dan dialek)



Bagan 2. Persentase Berbahasa Daerah Menurut Generasi

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2023, p. 22).

masing-masing. Bahasa (dan dialek) itu, pada umumnya, digunakan untuk berkomunikasi antarmereka, sama suku, dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berkomunikasi dengan suku lain, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Pada umumnya para pendatang (bukan suku Lampung) hidup berkelompok sehingga membentuk komunitas suku yang mendominasi wilayah tertentu. Kuat dugaan, perilaku seperti itulah yang menyebabkan terciptanya kantong-kantong bahasa (daerah) di wilayah Provinsi Lampung.

Hal ini turut menjadi faktor penyebab minimnya penggunaan bahasa Lampung di Provinsi Lampung. Kondisi bahasa Lampung di perkotaan cukup mengkhawatirkan dikarenakan sebagai ibukota provinsi tentu kondisi demografis masyarakatnya bersifat heterogen dengan keberagaman etnisnya. Hal ini diakui oleh Biro Kesra Pemerintah Provinsi Lampung (2023, p. 1) yang menekankan penggunaan bahasa Lampung di daerah perkotaan semakin sulit untuk ditemukan terlebih pada ruang-ruang publik. Kondisi ini sejalan dengan hasil observasi penulis di ruang publik seperti kantor pemerintahan, restoran, toko, lingkungan di sekitar sekolah dan pengemudi taksi daring yang terdengar menggunakan bahasa Indonesia.

Temuan ini memperkuat penelitian Rahayu (2020, p. 47) yang menyimpulkan bahwa bahasa Lampung sudah semakin terpinggirkan, baik oleh bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah lainnya, maupun bahasa gaul. Pendapat Rahayu di atas menguatkan hasil observasi yang dilakukan Putri (2018), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran bahasa Lampung di Kota Bandar Lampung. Faktor-faktor tersebut antara lain loyalitas bahasa, konsentrasi wilayah pemukiman penutur, pemakaian bahasa pada ranah tradisional sehari-hari, kesinambungan peralihan bahasa-ibu antargenerasi, pola-pola kedwibahasaan, mobilitas sosial, dan sikap bahasa (Putri, 2018, p. 93). Oleh karena itu, revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat daya hidup bahasa Lampung tergolong rentan, jumlah penutur bahasa Lampung yang relatif banyak, serta bahasa Lampung yang digunakan secara bersaing dengan bahasa-bahasa daerah lain.

Temuan: Implementasi Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung

Implementasi revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung dilakukan dengan Model B, yaitu dilakukan secara terstruktur melalui kegiatan pembelajaran muatan lokal di sekolah dan pengembangan dengan melibatkan komunitas. Selain itu, pendokumentasian bahasa daerah terus menjadi program unggulan di daerah.

Pembelajaran Berbasis Sekolah

Model pembelajaran ini dapat dilakukan secara terstruktur karena kondisi provinsi ini yang memiliki sedikit jenis bahasa daerah. Di Lampung, kebijakan pembelajaran bahasa daerah sudah ada sebelum MBKM Episode 17 diluncurkan, yaitu sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai muatan tentang Muatan Lokal (Pergub 39/2014). Dengan adanya Pergub 39/2014 ini setiap siswa tingkat dasar dan menengah wajib mempelajari bahasa Lampung tanpa terkecuali (Rahayu, 2020, p. 48). Muatan lokal Bahasa dan Aksara Lampung diberikan waktu 2 jam pelajaran untuk setiap jenjang pendidikan dari SD sampai SMA. Sementara untuk SMK/MAK mendapatkan 3 jam pelajaran untuk kelas X dan masing-masing 4 jam pelajaran untuk kelas XI dan XII.

Pergub 39/2014 ini menegaskan pembelajaran bahasa dan aksara Lampung di sekolah bertujuan untuk (1) memperoleh pengalaman berbahasa dan bersastra Lampung; (2) menghargai dan membanggakan bahasa Lampung yang juga merupa-

kan bahasa ibu pada sebagian masyarakatnya; (3) memahami bahasa dari segi bentuk, makna dan fungsi, serta mampu menggunakannya secara tepat dan kreatif untuk berbagai konteks (tujuan, keperluan, dan keadaan); (4) menggunakan bahasa Lampung untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial; (5) memiliki kemampuan dan kedisiplinan dalam berbahasa Lampung (berbicara, mendengar, membaca, menulis, dan berpikir); (6) menikmati dan memanfaatkan karya sastra Lampung untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa Lampung, mengembangkan kepribadian dan memperluas wawasan kehidupan; (7) menghargai dan membanggakan sastra Lampung sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Lampung; serta (8) membaca dan menulis aksara Lampung sesuai konteks.

Instansi yang bertanggung jawab dalam program ini adalah dinas pendidikan. Dalam kurikulum terbaru, Kurikulum Merdeka, telah diberikan ruang bagi daerah untuk memasukkan muatan lokal berdasarkan karakteristik dan kearifan lokal daerahnya. Menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek, Zulfikri, dalam Kurikulum Merdeka, sekolah dapat menambahkan muatan lokal yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerahnya melalui tiga opsi yang fleksibel (Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, 2022). Opsi pertama adalah membuat mata pelajaran khusus untuk muatan lokal. Opsi kedua adalah mengintegrasikan muatan lokal ke dalam semua mata pelajaran. Opsi ketiga adalah melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan begitu, pembelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal memang tidak selalu dapat dilaksanakan. Perlu diingat bahwa penerapan muatan lokal bahasa daerah hanya dapat dilakukan pada komunitas yang homogen (Lauder, 2023).

Badan Bahasa sendiri memilih peran perancangan kurikulum bahasa daerah di sekolah untuk mendorong pembelajaran. Namun, di Provinsi Lampung, Kantor Bahasa Provinsi Lampung belum berperan dalam pengembangan kurikulum bahasa daerah karena kurikulum muatan lokal dibuat sendiri oleh sekolah bersangkutan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, 2023).

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan muatan lokal bahasa dan aksara Lampung adalah ketersediaan tenaga pengajar. Universitas Lampung (UNILA) merupakan LPTK yang menyuplai guru bahasa Lampung. Pendidikan bahasa Lampung dijalankan dengan merujuk kepada kurikulum yang dibuat oleh Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung (MPBKL) dan Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung (PBL). S-1 PBL didirikan pada tahun 2020 dan MPBKL didirikan sejak 2014. Secara formal, pendidikan Bahasa Lampung untuk S-1 berlangsung selama 8-10 semester, sedangkan untuk S-2 berlangsung selama 4-6 semester (Ariyani, 2023). Dibukanya program studi (prodi) bahasa Lampung ini merupakan percobaan kedua sejak pernah dibuka jenjang diploma pada tahun 1998. Prodi itu tidak bertahan lama karena tidak ada dukungan pemerintah daerah terhadap lulusannya. Tanpa ada kejelasan peluang karier, prodi bahasa Lampung pun ditutup pada tahun 2006 (Kantor Bahasa Provinsi Lampung, 2019).

Namun sayang, program studi ini ditutup dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah tidak tersedianya lapangan kerja untuk lulusan D-3 Bahasa Lampung. (Kantor Bahasa Provinsi Lampung, 2023b, p. 4)

Meskipun demikian, mahasiswa yang terdaftar di Fakultas Bahasa Lampung menunjukkan minat belajar yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran. Pada tahun 2021, sebanyak 94 mahasiswa diterima untuk jenjang S-1 Prodi Bahasa Lampung dari jumlah pendaftar sebanyak 1.000 calon mahasiswa. Namun, untuk jenjang S-2 MPBKL,

minat animo pendaftar calon mahasiswanya tidak sebesar S-1 Prodi Bahasa Lampung. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena Prodi S-1 Bahasa Lampung baru didirikan pada tahun 2020 (Ariyani, 2023).

Mahasiswa memiliki minat yang kuat dalam menekuni bahasa Lampung dengan indikator bahwa mereka sangat berkomitmen ketika harus belajar secara aktif di kelas bahasa Lampung secara intensif. Bahasa Lampung sebagai alat sangat penting dan berkaitan erat dengan budaya Lampung. Oleh sebab itu, mahasiswa dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Lampung sangat ditentukan dengan kemampuan dan keterampilan berbahasa Lampung. Fungsi bahasa Lampung dalam hal ini sebagai piranti budaya. Hal tersebut didukung oleh kenyataan di lapangan masih berlakunya upacara adat Lampung yang menggunakan bahasa Lampung. Hal tersebut menjadi sumber data bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Ariyani, 2023). Minat dan komitmen mahasiswa terhadap bahasa Lampung penting dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Lampung didukung oleh fungsinya sebagai piranti budaya.

Selain pembelajaran di sekolah, pewarisan bahasa Lampung dalam wilayah tutur bahasa juga dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis komunitas. Komunitas bahasa Lampung memiliki berbagai acara untuk meningkatkan keinginan berbahasa Lampung. Dalam acara-acara tersebut, masyarakat dapat belajar dan memperdalam bahasa Lampung, seperti mengenal kosakata, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Lampung. Dengan pembelajaran bahasa Lampung melalui komunitas, diharapkan masyarakat Lampung dapat memperkuat penggunaan bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-hari dan melestarikan bahasa daerah tersebut bagi generasi selanjutnya.

Untuk memotivasi penggunaan bahasa Lampung, diselenggarakan Kongres Bahasa Lampung pada tanggal 8–9 Desember 2022 oleh Biro Kesra melalui sekretariat bahasa, yang menghasilkan berbagai rekomendasi untuk pembinaan dan pelestarian bahasa daerah. Acara ini juga didukung oleh UNILA.

Dokumentasi Bahasa Daerah

Pendokumentasian bahasa daerah dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam beberapa bentuk. Pertama, Kantor Bahasa Provinsi Lampung menyusun kamus bahasa daerah yang bertujuan untuk memperkaya kosakata bahasa daerah dan memudahkan masyarakat dalam memahami bahasa daerah tersebut. Beberapa kamus bahasa daerah yang telah disusun oleh Pusat Bahasa antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia Dialek Banjar, Kamus Besar Bahasa Indonesia Dialek Melayu Riau, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia Dialek Jawa. “Diseminasi Penyusunan Kamus Budaya Lampung” telah dilaksanakan pada hari Rabu, 14 September 2022, di Aula Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Kepala BPMP Provinsi Lampung, Kepala Kantor Bahasa Lampung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dan Prof. Admin Syarif dari Universitas Lampung. Kegiatan tersebut diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari guru bahasa daerah, anggota MPAL, dan perwakilan instansi pemerintah dan swasta di Bandar Lampung.

Kedua, Kantor Bahasa Provinsi Lampung juga melakukan kegiatan penerjemahan bahan bacaan berbahasa Lampung untuk melakukan pelestarian bahasa Lampung. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Tahun 2023, sebanyak 29 naskah akan dicetak dan disebarluaskan secara luas. Sasaran pembaca adalah siswa sekolah dasar.

Bahan bacaan yang diterbitkan akan terus dikembangkan sehingga dapat menyajikan bacaan dua kolom (satu kolom bahasa Indonesia dan satu kolom bahasa Lampung) secara berdampingan untuk memudahkan pembaca.

Tantangan Implementasi Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung

Tantangan utama dalam revitalisasi bahasa daerah Lampung adalah permasalahan psikologis masyarakat. Salah satu masalah utamanya adalah adanya rasa malu dalam menggunakan bahasa Lampung, karena dianggap sebagai bahasa kampung. Hal ini menimbulkan stigma bahwa penggunaan bahasa daerah merupakan tanda bahwa seseorang kampungan. Selain itu, dalam interaksi sehari-hari, bahasa Lampung tergeser oleh bahasa daerah lain yang lebih dominan, seperti bahasa Jawa dan Sunda. Hal ini dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Lampung.

Tantangan selanjutnya dalam revitalisasi bahasa daerah Lampung adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam mempromosikan bahasa daerah. Salah satu contohnya adalah lemahnya dukungan dalam pemenuhan guru pengajar bahasa Lampung di sekolah. Sejak ditutupnya program studi pendidikan bahasa Lampung di Universitas Lampung pada tahun 2006, terjadi kekurangan SDM pendidik bahasa Lampung. Saat ini, jumlah guru yang bersertifikasi bahasa Lampung masih sangat sedikit, yaitu sebanyak 112 orang pada tahun 2020 menurut data Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

Tabel 4. Jumlah Guru Bahasa Lampung, Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			Jumlah
		SD	SMP	SMA/SMK	
1.	Bandar Lampung	13	36	-	49
2.	Metro	-	5	-	5
3.	Lampung Selatan	2	4	-	6
4.	Lampung Utara	-	6	-	6
5.	Lampung Timur	-	2	-	2
6.	Lampung Barat	-	3	-	3
7.	Lampung Tengah	3	5	-	8
8.	Pesawaran	2	5	-	7
9.	Pringsewu	-	7	-	7
10.	Tanggamus	-	2	-	2
11.	Pesisir Barat	-	1	-	1
12.	Tulang Bawang	1	4	-	5
13.	Tulang Bawang Barat	-	2	-	2
14.	Way Kanan	2	3	-	5
15.	Mesuji	-	-	-	-
Jumlah		23	89	0	112

Sumber: Kantor Bahasa Provinsi Lampung (2023b).

Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan promosi dan pengembangan bahasa daerah Lampung, termasuk memberikan dukungan kepada para guru dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengajaran bahasa Lampung di sekolah.

Untuk mengisi kebutuhan pengajar bahasa Lampung di sekolah, terkadang terpaksa dicarikan guru lain, seperti guru Bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah guru yang bersertifikasi bahasa Lampung di Lampung. Sebagaimana dikutip dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung (2023b, p. 3),

“Bahasa Lampung terpaksa diajarkan oleh guru bidang studi lain yang dianggap mampu berbahasa Lampung. Misalnya wali kelas atau guru bahasa Indonesia.”

Kondisi ini berimplikasi pada bertambahnya beban kerja guru yang bersangkutan, dan di sisi lain, guru tersebut tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengajar bahasa Lampung dengan baik. Sayangnya, kondisi tersebut belum segera diatasi oleh pemerintah daerah. Pada program seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilaksanakan sejak 2021, Provinsi Lampung tidak membuka formasi untuk guru bahasa Lampung.

Formasi guru PPPK yang minim untuk bahasa Lampung menunjukkan masih lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan bahasa Lampung. Hal ini menjadi masalah serius mengingat minimnya SDM pengajar bahasa Lampung yang berkualitas, sehingga Pergub 39/2014 yang memuat tentang pembelajaran bahasa Lampung di sekolah sulit untuk dilaksanakan dengan baik.

Kurangnya persiapan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan mata pelajaran bahasa Lampung dapat menjadi kendala dalam upaya pelestarian bahasa Lampung di daerah. Dalam konteks ini, buruknya perencanaan pemerintah daerah telah menghambat upaya revitalisasi bahasa daerah Lampung secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengajar bahasa Lampung di Lampung dan memperbaiki perencanaan dalam pelaksanaan mata pelajaran bahasa Lampung di sekolah, sehingga upaya pelestarian bahasa daerah Lampung dapat berjalan dengan lebih baik.

Tantangan terakhir adalah sinergisitas antarinstansi dalam menjalankan program-program revitalisasi bahasa daerah masih sangat lemah. Meskipun ada upaya untuk memperkenalkan mata pelajaran muatan lokal, namun program ini tidak mendapat dukungan yang memadai dari SDM, bahan ajar yang sesuai, kurikulum yang mendukung, dan sarana prasarana yang memadai. Salah satu masalah utama adalah kurangnya guru yang berkualitas untuk mengajar bahasa daerah. Meskipun UNILA telah berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan guru, saat ini belum ada lulusan S-1 Bahasa Lampung yang diluluskan. Hal ini seharusnya diantisipasi pemerintah dengan menyediakan guru dari sumber lain, misalnya dengan melatih penutur jati menjadi guru dengan pola rekognisi pembelajaran lampau. Untungnya masih ada harapan bagi calon guru setelah UNILA beraudiensi dengan pemerintah daerah untuk memastikan lapangan kerja bagi guru baru tersebut. Salah satunya adalah mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam membuka formasi guru bahasa daerah.

Selain itu, dinas pendidikan perlu memberikan ruang bagi kolaborasi antara sekolah dan Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk menghasilkan kurikulum yang terbaik. Hal ini akan membantu memastikan bahwa mata pelajaran muatan lokal dapat diajarkan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Acara-acara kebahasaan yang diadakan secara mandiri oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dinas pendidikan, ataupun bidang Kesra akan lebih luas dampaknya jika dilakukan bersama dan berkelanjutan. Dengan demikian, program-program revitalisasi bahasa daerah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan berkesinambungan, serta membantu melestarikan bahasa daerah di daerah tersebut.

Penutup

Kepunahan bahasa daerah di Indonesia menjadi permasalahan yang semakin penting dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Kemendikbudristek menjawab situasi krisis tersebut dengan menggelar Merdeka Belajar Episode 17 Revitalisasi Bahasa Daerah. Provinsi Lampung mulai mengimplementasikan kebijakan revitalisasi di tahun 2023. Implementasi revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung dilaku-

kan dengan Model B, yaitu dilakukan secara terstruktur melalui kegiatan pembelajaran muatan lokal di sekolah. Sebelum dicanangkan Episode 17, Provinsi Lampung sudah memiliki Pergub 39/2014 yang mengatur pembelajaran muatan lokal bahasa Lampung di sekolah dasar dan menengah. Selain itu, diselenggarakan juga Kongres Bahasa Lampung oleh Bidang Kesra Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan UNILA. Pendokumentasian bahasa daerah yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung juga berperan penting dalam menyosialisasikan bahasa Lampung.

Ada dua tantangan dalam implementasi revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung. Pertama, permasalahan psikologis masyarakat yang berkurang menuturkan bahasa Lampung, kurangnya dukungan pemerintah dalam program melestarikan bahasa daerah. Kedua, masih lemahnya sinergisitas antarinstansi dalam menjalankan program-program revitalisasi bahasa daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan terpadu dari semua pihak untuk menggalakkan penggunaan bahasa daerah, mendokumentasikan bahasa daerah, memberikan dukungan pemerintah yang lebih konsisten, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan bahasa daerah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan contoh bagi daerah dengan status kebahasaan dan kondisi masyarakat serupa. Dengan demikian, program revitalisasi bahasa daerah dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

Komisi X perlu mendukung upaya revitalisasi bahasa daerah yang perlu didongkrak dengan perbaikan penganggaran untuk mengoptimalkan program revitalisasi. Selain itu, perlu dipertimbangkan kebutuhan untuk membentuk payung hukum baru untuk menguatkan upaya revitalisasi bahasa daerah. Sudah waktunya Komisi X mempertimbangkan untuk mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah yang diinisiasi Dewan Perwakilan Daerah sejak 2015 untuk dibahas sebelum periode keanggotaan 2019–2024 berakhir.

Daftar Pustaka

- Ariyani, F. (2023, Februari 15). Jawaban [Jawaban Tertulis]. In FGD Pengumpulan Data Prolegnas Bidang Kesejahteraan Rakyat “Urgensi pengaturan bahasa daerah: Studi kasus di Provinsi Lampung dan Provinsi Maluku”.
- Aziz, E. A. (2023, Februari 16). [Paparan]. In *Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, Generasi Muda Cinta Bahasa Daerah*. Kemendikbud RI Youtube Chanel. <https://www.youtube.com/watch?v=B6A9GdQSTco&t=591s>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). *Penyebaran Bahasa di Indonesia*. Peta Bahasa. Retrieved January 25, 2023, from <https://petabahasa.kemdikbud.go.id>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023, Februari 23). *Sejarah Badan Bahasa*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Retrieved February 23, 2023, from <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/sejarah>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Bahasa Lampung*. Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. <https://petabahasa.kemdikbud.go.id/infobahasa.php?idb=45>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2022). *Provinsi Lampung dalam angka 2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023). *Hasil long form sensus penduduk 2020 Provinsi Lampung*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020* [booklet]. Badan Pusat Statistik.
- Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. (2022, Desember 9). *Berkomitmen majukan bahasa Indonesia dan daerah, Badan Bahasa dan Pemprov Lampung sepakati kerja sama*. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Retrieved Maret 17, 2023, from <https://balaibahasajabar.kemdikbud.go.id/berkomitmen-majukan-bahasa-indonesia-dan-daerah-badan-bahasa-dan-pemprov-lampung-sepakati-kerja-sama/>
- Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek. (2022, Agustus 2). *Implementasi Kurikulum Merdeka, muatan kearifan lokal bisa dimasukkan melalui tiga opsi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved Maret 28, 2023, from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/08/implementasi-kurikulum-merdeka-muatan-kearifan-lokal-bisa-dimasukkan-melalui-tiga-opsi>
- Biro Kesra Pemerintah Provinsi Lampung. (2023, Februari 28). [Jawaban Biro Kesra Provinsi Lampung]. In *FGD Pengumpulan Data Prolegnas Bidang Kesejahteraan Rakyat “Urgensi Pengaturan Bahasa Daerah: Studi Kasus Di Provinsi Lampung dan Provinsi Maluku*.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. (2023, Februari 28). Jawaban [Jawaban]. In *FGD Pengumpulan Data Prolegnas Bidang Kesejahteraan Rakyat “Urgensi Pengaturan Bahasa Daerah: Studi Kasus Di Provinsi Lampung dan Provinsi Maluku*.
- Friedman, D. A. (2011). Language socialization and language revitalization. In A. Duranti, E. Ochs, & B. B. Schieffelin (Eds.), *The Handbook of Language Socialization* (pp. 631–647). Blackwell Publishing Limited. <https://doi.org/10.1002/9781444342901.ch27>
- Gandhawangi, S. (2023, Februari 13). 59 bahasa daerah akan direvitalisasi. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/02/13/59-bahasa-daerah-akan-direvitalisasi-di-2023>
- Ghofar, M. (2022, Februari 23). Wakil Ketua Komisi X DPR RI sarankan revitalisasi bahasa daerah di Kaltim. *Antara News kaltim*. <https://kaltim.antaranews.com/berita/145221/wakil-ketua-komisi-x-dpr-ri-sarankan-revitalisasi-bahasa-daerah-di-kaltim>
- Harimansyah, G. (2017). *Pedoman konservasi dan revitalisasi bahasa*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Hutapea, E. (2021, Desember 22). Bahasa daerah di Indonesia terancam punah, simak perinciannya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/22/061200071/bahasa-daerah-di-indonesia-terancam-punah-simak-perinciannya?page=all>
- Kantor Bahasa Provinsi Lampung. (2019, September 22). *Pemantauan, supervisi, dan koordinasi Pelaksanaan Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan sastra di Provinsi Lampung*. Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Retrieved March 31, 2023, from <https://kantorbahasalampung.kemdikbud.go.id/pemantauan-supervisi-dan-koordinasi-pelaksanaan-konservasi-dan-revitalisasi-bahasa-dan-sastra-di-provinsi-lampung/>
- Kantor Bahasa Provinsi Lampung. (2022b, September 16). *Diseminasi penyusunan kamus budaya Lampung*. Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Retrieved March 17, 2023, from <https://kantorbahasalampung.kemdikbud.go.id/diseminasi-penyusunan-kamus-budaya-lampung/>
- Kantor Bahasa Provinsi Lampung. (2023a, Januari). *Laporan Kinerja 2022*. Kantor Bahasa Lampung. http://kantorbahasalampung.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/01/LAKIN-2022-240123-Final_opt.pdf
- Kantor Bahasa Provinsi Lampung. (2023b, Februari 14). Jawaban [Paparan]. In *FGD Pengumpulan Data Prolegnas Bidang Kesejahteraan Rakyat “Urgensi Pengaturan Bahasa Daerah: Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Provinsi Maluku”*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017, Juni 21). *Ini 10 objek budaya dalam UU Pemajuan Kebudayaan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia. Retrieved Maret

- 14, 2023, from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/ini-10-objek-budaya-dalam-uu-pemajuan-kebudayaan>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022a). *Buku saku revitalisasi bahasa daerah*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/upload/file/184_1645531041.pdf
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022b). *Revitalisasi bahasa daerah [Infografik]*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022c, Juli 1). *Revitalisasi bahasa daerah wujud gotong royong seluruh pemangku kepentingan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia. Retrieved Maret 10, 2023, from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/07/revitalisasi-bahasa-daerah-wujud-gotong-royong-seluruh-pemangku-kepentingan>
- Lauder, M. (2023). Urgensi pengaturan bahasa daerah [Verbatim]. In FGD Pra Pengumpulan Data Prolegnas “Urgensi Pengaturan Bahasa Daerah: Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Provinsi Maluku.
- Montgomery-Anderson, B. (2013). Macro-scale features of school-based language revitalization programs. *Journal of American Indian Education*, 52(3), 41–64.
- Na'im, A., & Syaputra, H. (2010). *Kewarganegaraan, suku bangsa, agama, dan bahasa sehari-hari penduduk Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Nita, D. I. (2022, Maret 23). Membunuh rasa malu berbahasa ibu. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/22/membunuh-rasa-malu-berbahasa-ibu>
- Perley, B. C. (2021). Language revitalization. In J. Stanlaw (Ed.), *The International Encyclopedia of Linguistic Anthropology* (pp. 1–5). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118786093.iela0220>
- Pine, A., & Turin, M. (2017). Language revitalization. In *Oxford Research Encyclopedias*. <https://oxfordre.com/linguistics/display/10.1093/acrefore/9780199384655.001.0001/acrefore-9780199384655-e-8>
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2017). *Laporan akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai sistem pendidikan nasional [Laporan Akhir]*. [bphn.go.id. https://bphn.go.id/data/documents/ae_sisdiknas.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/ae_sisdiknas.pdf)
- Putri, N. W. (2018). Pergeseran bahasa daerah Lampung pada masyarakat Kota Bandar Lampung. *Prasasti: Journal of Linguistic*, 3(1), 83–97.
- Rahayu, R. (2020). Pelaksanaan mulok bahasa Lampung dalam upaya pelestarian bahasa Lampung di Kabupaten Lampung Selatan. *Kelasa*, 15(1), 46–63.
- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2011). Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antarbudaya [Ringkasan Eksekutif]. In *Laporan Dunia Unesco*. UNESCO.
- Warhol, L. (2012). Legacies of NALA: The Esther Martinez Native American Languages Preservation Act and implications for language revitalization policy and practice. *Journal of American Indian Education*, 51(3), 70–91. <https://www.jstor.org/stable/43608638>
- Williams, C. H. (2013). The lightning veil: Language revitalization in Wales. *Review of Research in Education*, 38, 242–272. <https://www.jstor.org/stable/43284069>

Lampiran

Pengodean

(1) Bagaimana implementasi revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung?

Informan	Kegiatan Revitalisasi
Kantor Bahasa Provinsi Lampung (KBPL)	Program pembinaan bahasa Lampung melalui program revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan tahun 2023. Program ini melibatkan banyak pihak di antaranya DPR RI, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, para pakar, budayawan, guru, dan siswa.
	KBPL melakukan kegiatan penerjemahan bahan bacaan berbahasa Lampung melakukan pelestarian bahasa Lampung. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Tahun 2023, sebanyak 29 naskah akan dicetak dan disebarakan secara luas. Sasaran pembaca adalah siswa sekolah dasar.
	Biro Kesra melalui Sekretariat Bahasa melaksanakan Kongres Bahasa Daerah Lampung tahun 2022 yang menghasilkan berbagai rekomendasi untuk pembinaan dan pelestarian bahasa daerah.
	Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara sebagai Muatan Lokal Wajib pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Pergub 39/2014).
Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Pendidikan bahasa Lampung di sekolah masuk dalam mata pelajaran muatan lokal berdasarkan Pergub 39/2014.
Bidang Kesra Pemerintah Provinsi Lampung	Secara periodik pada setiap tahunnya Biro Kesra menggagas berbagai program kegiatan yang senantiasa berfokus pada upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan aksara Lampung. Saat ini Biro Kesra sudah memiliki panduan dalam penyusunan program kerja yang dimuat dalam grand design.
	Bahasa Lampung sebagai bahasa daerah sudah diajarkan pada jalur pendidikan formal di satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pergub 39/2014 yang mewajibkan seluruh sekolah di Provinsi Lampung untuk mengajarkan bahasa Lampung sebagai mata pelajaran muatan lokal.
	Minimnya program kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi lain dalam upaya mengelola melestarikan dan membina bahasa Lampung.
Akademisi UNILA	Dilaksanakan Kongres Bahasa Lampung oleh Pemda Provinsi Lampung bekerja sama dengan UNILA Prodi MPBKL pada tahun 2022.
	Telah terbit katalog manuskrip Lampung pertama, hasil kerja sama Kementerian Agama, Pemda Provinsi Lampung, dan UNILA. Telah ada Pergub 39/2014.

(2) Apa saja tantangan dalam implementasi revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung?

Informan	Payung Hukum	Permasalahan SDM
Kantor Bahasa Provinsi Lampung (KBPL)	Kebutuhan hukum dalam upaya pelestarian bahasa Lampung barangkali yaitu diadakannya peraturan penggunaan bahasa Lampung sehari dalam seminggu di lingkungan pemerintahan.	Minimnya tenaga pendidik bahasa Lampung yang berijazah Pendidikan Bahasa Lampung. Bahasa Lampung terpaksa diajarkan oleh guru bidang studi lain yang dianggap mampu berbahasa Lampung. Misalnya wali kelas atau guru bahasa Indonesia.

Informan	Payung Hukum	Permasalahan SDM
	<p>Pengaturan jumlah jam pelajaran bahasa Lampung yang hanya 72 jam dalam satu tahun dirasakan tidak cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran.</p>	<p>Guru bersertifikasi Bahasa Lampung adalah alumni D-3 Bahasa Lampung dengan ijazah S-1 Bahasa Indonesia. Guru bersertifikasi Bahasa Lampung juga dari jurusan mata pelajaran lain, seperti Pendidikan Agama, IPS, Bahasa Indonesia. Pada Tahun 2013, alumni D-3 Bahasa Lampung banyak beralih sertifikasi karena terkendala S-1 belum ada saat itu. Guru bahasa Lampung yang ada saat ini tidak jelas ketetapannya, baik dengan kesesuaian jenjang pendidikan atau pun dengan upahnya.</p> <hr/> <p>Estimasi jumlah kebutuhan guru Bahasa Lampung untuk tingkat SD/MI jumlah sekolah (5.412) kebutuhan guru (10.824). Tingkat SMP/MTs, jumlah sekolah (2.028), kebutuhan guru (4.056). Tingkat SMA/SMK/MA, jumlah sekolah (1.284), kebutuhan guru 2.568. Total jumlah sekolah 8.724 dan total kebutuhan guru 17.488 orang.</p>
<p>Dinas Pendidikan Provinsi Lampung</p>	<p>Kurikulum Merdeka Belajar muatan lokal Bahasa Lampung terpaksa harus berbagi jam dengan mata pelajaran Anti Korupsi.</p> <hr/> <p>Keterbatasan anggaran dalam pengadaan bahan ajar, rekrutmen guru, kurikulum, dan regulasi pusat yang berubah-ubah.</p>	<p>Untuk saat ini guru yang mengajar mata pelajaran bahasa dan aksara Lampung hanya sekitar 30 persen dari ketersediaan guru yang ada di semua jenjang sekolah.Dari 30 persen guru bahasa dan aksara Lampung tersebut hanya 40 persen saja yang memang bersuku Lampung.</p> <hr/> <p>Keterbatasan anggaran dalam pengadaan bahan ajar, rekrutmen guru, dan kurikulum.</p>
<p>Bidang Kesra Pemerintah Provinsi Lampung</p>	<p>Sangat dibutuhkan pengaturan khusus yang berfokus pada upaya pengembangan bahasa Lampung, Selain itu, sangat dibutuhkan kebijakan yang mengatur secara konkret sampai pada hal-hal yang sangat teknis.</p>	<p>Bahasa Lampung sebagai bahasa daerah sudah diajarkan pada jalur pendidikan formal di satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah. ...Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih didapati banyak sekolah yang tidak mengajarkan bahasa Lampung. Bahkan, kondisi tersebut juga diperparah dengan adanya beberapa sekolah yang mengurangi jam mata pelajaran yang semula 2 JP menjadi hanya 1 JP dalam satu pekan.</p>

Informan	Payung Hukum	Permasalahan SDM
	<p>Saat ini sangat dibutuhkan produk hukum yang secara khusus mengatur pelestarian dan pengembangan bahasa Lampung</p> <hr/> <p>Beberapa peraturan yang sudah terbit dalam hal implementasi di lapangan dirasa berjalan kurang optimal karena dalam penerapannya masih didapati beberapa institusi yang belum menerapkannya secara baik.</p> <hr/> <p>(Dibutuhkan aturan) pembelajaran bahasa Lampung di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.</p>	
Akademisi UNILA	<p>Kebutuhan hukum dalam upaya pelestarian bahasa Lampung sangat dibutuhkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan peraturan gubernur karena seluruh kegiatan dalam upaya melestarikan bahasa Lampung memerlukan landasan yuridis yang jelas...</p> <hr/> <p>Tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, dan seni merupakan juga aspek yang perlu dilindungi dalam peraturan khusus terkait bahasa daerah (bahasa Lampung). Oleh sebab itu diperlukan UU Perlindungan Bahasa, Aksara, dan Sastra Daerah.</p> <hr/> <p>Visi dan misi pembinaan dan pengembangan bahasa daerah telah dicanangkan dan tidak dapat dilaksanakan, kecuali telah disusunnya langkah untuk mencapai dan menggapainya.... dengan merancang UU tentang bahasa daerah (bahasa Lampung).</p> <hr/> <p>(Dibutuhkan aturan substansi) alokasi anggaran khusus bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Lampung di sekolah dan kampus.</p>	Secara formal, guru bahasa Lampung banyak yang tidak memiliki kualifikasi sebagai pengajar bahasa Lampung (belum pernah ada pengangkatan guru bahasa Lampung bersertifikasi). ...